



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

RENJA PERUBAHAN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1.
1.2	Landasan Hukum	3.
1.3	Maksud dan Tujuan	5.
1.4	Dasar Pertimbangan	6.
1.5	Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana kerja	7.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2025	9.
2.1	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9.
2.2	Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025	14.
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah... ..	16.
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	24.
BAB IV	PENUTUP	44.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam sebagai Satuan Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja tahun 2025. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terkait Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tahun 2021-2026 yakni menjalankan Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Agam yakni : ***“Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter”***.

Pelaksanaan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat merupakan hasil proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatar belakangi penyusunannya yang memerlukan perubahan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, didasarkan terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam sampai dengan Triwulan II serta pendanaannya. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam sampai Triwulan II, ditemui adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perkembangan asumsi prioritas pembangunan pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selaras dengan hal diatas, perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dilaksanakan sebagai sinkronisasi program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam No.23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Untuk itu perubahan pada anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025, landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja antara lain :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 6322)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini juga sebagai pedoman dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Sebagai penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021-2026) yang dituangkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (RKPD)
2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Dasar Pertimbangan

Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain hal diatas perubahan Rencana kerja perangkat daerah dilakukan sebagai sinkronisasi dengan perubahan RKPD.

1.5. Sistimatika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Dasar Pertimbangan.
5. Sistematika Penulisan.

sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025

- 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah S.D Triwulan I Tahun 2025,
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH .

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

S.D TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Agam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai **tugas pokok** sebagai unsur pelaksana penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan, telah disusun Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tertuang pada Misi ke 4 pada RPJMD Kabupaten Agam yakni : ***“Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter”***.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kualitas Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah
4. Meningkatkan Perlindungan Perempuan
5. Menurunkan Unmet Need
6. Meningkatkan Ketahanan Keluarga

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .

Sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, dimana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang mempunyai kedudukan menyelenggarakan **tugas pokok** sebagai unsur pelaksana penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Didalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas,disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu:

- a. Kepala
- b. Sekretaris , membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi dan Penggerakan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan KB dan Alokasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Peran Pria
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Hak Perempuan

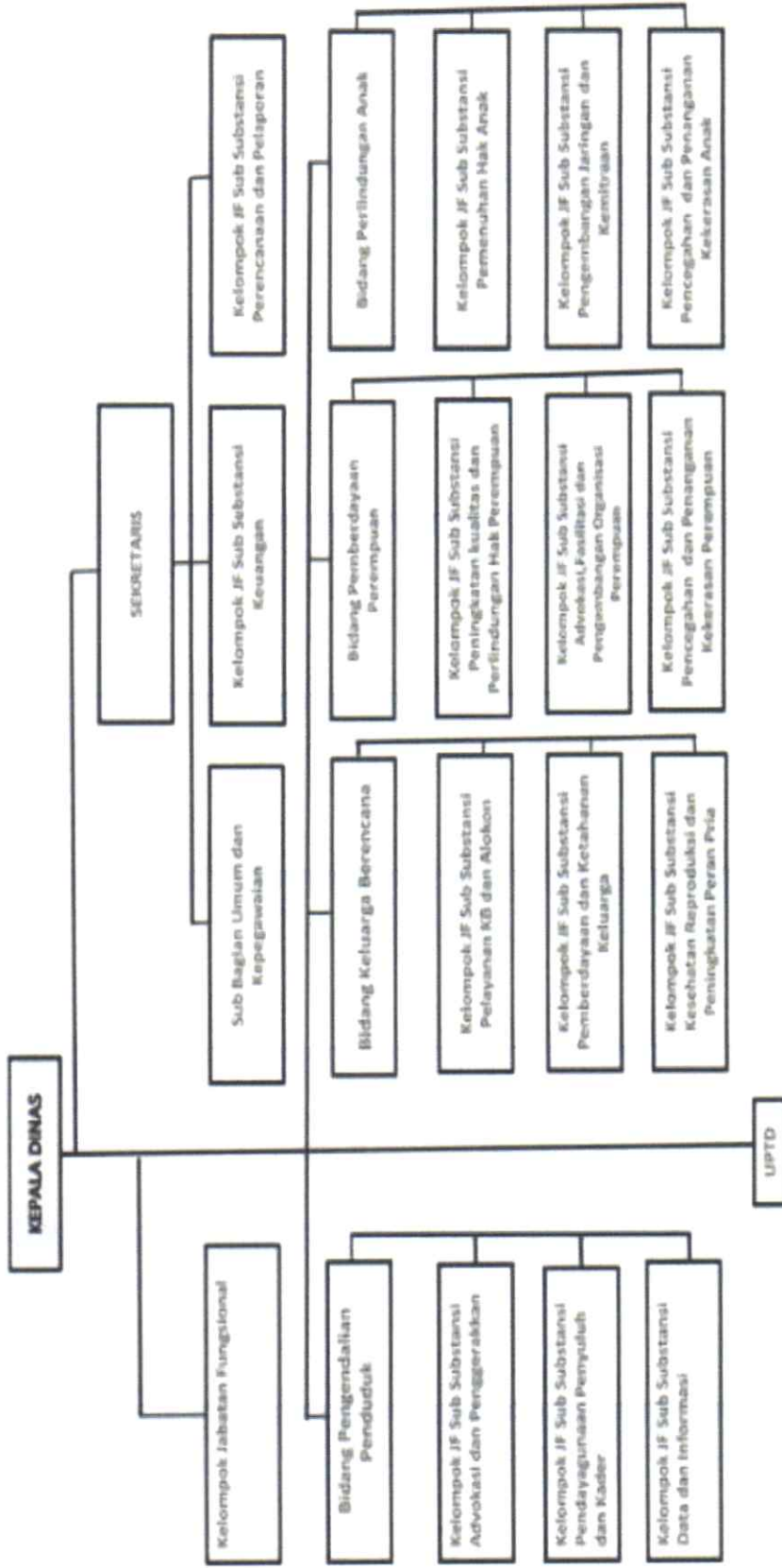
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi, Fasilitasi dan Pengembangan Organisasi Perempuan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (UPTD PPA)

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam



2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam untuk triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengansumsikan pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) program yang didukung 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)
2. Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan (3 Kegiatan)
3. Program Perlindungan Perempuan (2 Kegiatan)
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (1 Kegiatan)
5. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak (1 Kegiatan)
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (2 Kegiatan)
7. Program Perlindungan Khusus Anak (3 Kegiatan)
8. Program Pengendalian Penduduk (1 Kegiatan)
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (4 Kegiatan)
10. Program Pemberdayaan dan Penimngkatan Keluarga Sejahtera (KS) (2 Kegiatan)

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.650.128.941	5 Kegiatan
2.	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	359.628.000	2 Kegiatan
3.	Program Perlindungan Perempuan	76.401.451	2 Kegiatan
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000	1 Kegiatan
5.	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	14.324.000	1 Kegiatan
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	131.584.000	2 Kegiatan
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	352.441.199	3 Kegiatan
8.	Program Pengendalian Penduduk	298.535.000	2 Kegiatan
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.553.619.088	4 Kegiatan
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.636.743.585	2 Kegiatan
JUMLAH		15.223.405.264	24 Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung hingga Triwulan II (sampai dengan Bulan Juni 2024) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebesar Rp. 4.105.642.031. dari total anggaran sebesar Rp**15.223.405.264,-** atau 26,97 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.650.128.941	2.260.183.282	48.60
2.	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	359.628.000	33.728.200	9.38
3.	Program Perlindungan Perempuan	76.401.451	24.763.400	32.41
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000	6.560.000.	0.1
5.	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	14.324.000	0.	0
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	131.584.000	44.966.950.	34.17
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	352.441.199	79.261.800.	4.02
8.	Program Pengendalian Penduduk	298.535.000	63.994.280.	21.44
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.553.619.088	938.845.619.	14.33
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.636.743.585	653.338.500.	24.78
JUMLAH		15.223.405.264	4.105.642.031	26.97

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dilakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja pelayanan yaitu dari kelompok indikator yang dikembangkan Perangkat Daerah secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tingkat kinerja pelayanan dengan kategori baik. Hal ini tergambar dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100 Persen	44.43 Persen	44.43 Persen
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum	100 Persen	72.75 Persen	13 Persen
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	8 %	0 %
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	100 %	39.28%	24.96%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	56 %	15.75 %

2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD.

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	55 OPD	0	0

2.	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	60 Orang	0	0
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	19 Organisasi	19 Organisasi	100 %

3. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan komprehensif

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus perempuan yang ditangani	10 kasus	5 kasus	50%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	3 Layanan	3 Layanan	100%

4. Persentase pemenuhan pilar - pilar kualitas keluarga

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	3 kegiatan	-	0

5. Persentase penyajian data gender dan anak

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	15 buku	-	0

6. Indek Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Layak Anak	65 (Nilai)	-	0

7. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan secara komprehensif

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek	200 orang	-	0 %
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan	50 Orang	34 Orang	68%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi	Jumlah UPTD PPA	1 lembaga	1 Lembaga	100

	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
--	--	--	--	--	--

8. Angka prevelansi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive (mCPR)

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	27 opd	-	0
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	50000 KK	-	0

9. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	6000 Orang	1759 orang	29,31
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Jumlah PKB yg dibina	25 Orang	25 Orang	100
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Jumlah Akseptor yang dilayani	2500 Orang	3014 Orang	120,56

	daerah Kabupaten/Kota				
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	58 Dokume n	27 Dokume n	-

10. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d juni 2025	%
1.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS	51 Kelompo k	20	39,21

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Pengarustamaan	55 OPD yang sudah mempunyai	GAB & GBS	Sosialisasi dan Advokasi	Perlunya Pembangunan	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gender (PPRG)	dokumen PPRG		dan pelatihan	responsif gender (PPRG)	1. Belum semuanya OPD memahami PPRG 2. Belum semuanya masyarakat paham ttg gender
Kasus KDRT	Meningkatnya laporan tentang Kasus kekerasan RT dan pelecehan seksual	UU KDRT dan peraturan lainnya	Sosialisasi dan pelacakan	Dukungan dari OPD dan P2TP2A	1. Belum semuanya masyarakat mengetahui ttg kasus KDRT 2. Belum semuanya kasus teridentifikasi dan terfasilisasi
Pembinaan dan Pelayanan KB	Telah terlayani-nya peserta KB baru dan peserta KB Aktif di Klinik2 yang telah ditentukan.	UU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	Menyelenggarakan pengendalian kualitas dan kuantitas dengan mitra kerja	Adanya dukungan dari kader	1. Masih tinggi tingkat angka kelahiran kasar 2. Masih tingginya kebutuhan ber KB 3. Rendahnya partisipasi pria dalam ber KB 4. Masih rendahnya pelayanan KB di klinik swasta 5. rendahnya pemakaian MKJP
Advokasi dan KIE	Generasi berencana yang tersebar di SMP dan SMA telah dapat informasi	Peraturan	Sosialisasi ke sekolah-sekolah	Perlu dukungan instansi terkait	Belum semua sekolah SMP dan SMA mendapatkan informasi tentang GenRe, PIK Remaja

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Peningkatan kualitas hidup perempuan	Telah dilakukan pelatihan untuk perempuan kepala keluarga	Jumlah Perempuan Kepala keluarga miskin (PEKKA)	Sosialisasi dan pelatihan	Dukungan sektoral terkait	Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas hidup perempuan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Program dan Kegiatan.

Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Pengentasan Kemiskinan dan membuka akses ekonomi pada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan berbagai keterampilan.
- Peningkatan Pelayanan KB baik terhadap peserta KB wanita maupun Peserta KB Pria.
- Percepatan Penurunan Stunting

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain

- Jumlah Program/kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 sebanyak 10 Program dan 24 Kegiatan yang tertuang pada tabel rumusan renja tahun 2025.
- Sifat Penyebaran lokasi kegiatan pada umumnya tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Agam dan ada beberapa kegiatan yang terfokus pada beberapa kecamatan saja seperti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender , ada kegiatan yang terfokus pada masyarakat tertentu yaitu : Forum Anak Daerah (Forda), Organisasi Perempuan, Kelompok PIK Remaja, Peserta KB baik Pria maupun Wanita, PPKBD dan Sub PPKBD, PKB, Kelompok UPPKA, BKB, BKL, BKR, Perempuan dan anak korban tindak kekerasan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Generasi Berencana (GenRe)

- Rencana program dan kegiatan beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, dapat dilihat pada Tabel berikut :

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. AGAM
TAHUN 2025

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		TARGET		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	95 persen	95 persen	4,889,555,176	4,701,902,841	(187,652,335)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Presentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100 persen	100 persen	3,989,427,722	4,040,530,722	51,103,000
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	3,928,637,722	3,974,900,722	46,263,000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60,790,000	65,630,000	4,840,000

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum	Presentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	312,239,352	157,854,619	(154,384,733)
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,697,600	9,697,600	-
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	57,952,364	43,744,609	(14,207,755)
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,162,800	4,050,000	(6,112,800)
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	234,426,588	100,362,410	(134,064,178)
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	69,894,102	59,347,500	(10,546,602)
3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	3 Unit	29,869,102	19,322,500	(10,546,602)
3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	40,025,000	40,025,000	-

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	368,735,000	370,975,000	2,240,000
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119,719,000	119,719,000	-
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	249,016,000	251,256,000	2,240,000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100 persen	100 persen	149,259,000	73,195,000	(76,064,000)
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	22,115,000	11,915,000	(10,200,000)
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit	94,000,000	50,110,000	(43,890,000)
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9 Unit	14,210,000	6,330,000	(7,880,000)

5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	18,934,000	4,840,000	(14,094,000)
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,02 persen	16,02 persen	385,000,000	358,528,000	(26,472,000)
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen GAP dan GAB	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen GAP dan GAB	55 OPD	55 OPD	40,000,000	18,950,000	(21,050,000)
1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	60 Orang	55 Orang	40,000,000	18,950,000	(21,050,000)
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	40 orang	45,000,000	39,578,000	(5,422,000)

2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	45,000,000	39,578,000	(5,422,000)
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	19 Organisasi	19 Organisasi	300,000,000	300,000,000	-
3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	300,000,000	300,000,000	-
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatka layanan Komperhensif	Presentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatka layanan Komperhensif	100 persen	100 persen	76,401,451	76,401,451	-

1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	10 kasus	2 kegiatan	50,000,000	50,000,000	-
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	-
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	3 layanan	3 layanan	26,401,451	26,401,451	-
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	26,401,451	26,401,451	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	83,3 persen	83,3 persen	150,000,000	150,000,000	-

1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	3 Kegiatan	2 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	-
1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	-
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyajian Data Gender dan Anak	Penyajian Data Gender dan Anak	100 persen	100 persen	33,000,000	14,324,000	(18,676,000)
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	15 buku	20 buku	33,000,000	14,324,000	(18,676,000)
1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	33,000,000	14,324,000	(18,676,000)
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	-	80 Persen	168,000,000	130,484,000	(37,516,000)

1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak	-	65 Persen	168,000,000	130,484,000	(37,516,000)
1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	10 Organisasi	168,000,000	130,484,000	(37,516,000)
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 persen	100 persen	372,483,549	351,341,199	(21,142,350)
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Bimtek	jumlah Peserta Bimtek	200 Orang	200 Orang	51,500,000	51,500,000	-

1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	200 Orang	120 Orang	51,500,000	51,500,000	-
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan	Jumlah AMPK Penerima Layanan	50 Orang	50 Orang	251,963,549	230,821,199	(21,142,350)
2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	48,225,000	27,082,650	(21,142,350)
2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	50 Layanan	50 Layanan	203,738,549	203,738,549	-
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD PPA	Jumlah UPTD PPA	1 Lembaga	1 Lembaga	69,020,000	69,020,000	-

3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	75 Orang	70 Orang	69,020,000	69,020,000	-
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	69,65 persen	69,65 persen	312,800,000	297,435,000	(15,365,000)
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	27 OPD	27 OPD	71,000,000	55,635,000	(15,365,000)
1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	71,000,000	55,635,000	(15,365,000)
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	50000 KK	50000 KK	241,800,000	241,800,000	-

2.1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	16 Laporan	16 Laporan	88,200,000	88,200,000	-
2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16 Dokumen	2 Dokumen	153,600,000	153,600,000	-
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,5 persen	12,5 persen	6,493,713,000	6,605,260,088	111,547,088
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru	6000 Orang	6000 Orang	1,365,169,000	1,376,716,088	11,547,088
1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	2 Laporan	120,000,000	79,906,088	(40,093,912)
1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	16 Laporan	722,720,000	722,720,000	-
1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana	16 Laporan	16 Laporan	320,000,000	320,000,000	-

	Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	67,750,000	67,750,000	-
1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35 Organisasi	35 Organisasi	134,699,000	186,340,000	51,641,000
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumah PKB yang Dibina	Jumah PKB yang Dibina	20 Orang	25 Orang	582,000,000	582,000,000	-
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	1251 Orang	1251 Orang	582,000,000	582,000,000	-

		Masyarakat Pedesaan (IMP)	Masyarakat Pedesaan (IMP)					
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/Kota	jumlah Akseptor yang dilayani	jumlah Akseptor yang dilayani	2500 Orang	7000 Orang	4,142,984,000	4,242,984,000	100,000,000
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan	24,300,000	24,300,000	-
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 Orang	2000 Orang	899,762,000	899,762,000	-
3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit	92 Unit	3,194,172,000	3,294,172,000	100,000,000

3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan	24,750,000	24,750,000	-
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	58 Dokumen	76 Dokumen	403,560,000	403,560,000	-
4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55 Kampung	76 Kampung	403,560,000	403,560,000	-
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	56.12 persen	56.12 persen	2,713,800,000	2,583,991,685	(129,808,315)

1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS	51 Kelompok	51 Kelompok	165,200,000	105,200,000	(60,000,000)
1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	60,200,000	40,200,000	(20,000,000)
1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	31 Unit	6 Unit	105,000,000	65,000,000	(40,000,000)

2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina	50 Kelompok	50 Kelompok	2,548,600,000	2,478,791,685	(69,808,315)
2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	16 laporan	10 laporan	1,113,000,000	1,113,000,000	-
2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	16 laporan	10 laporan	1,435,600,000	1,365,791,685	(69,808,315)
J U M L A H						15,594,753,176	15,269,668,264	(325,084,912)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja serta penganggaran pada Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada perubahan RKPD guna menjaga kesesuaian program dan kegiatan serta dalam rangka optimalisasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam.

Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya, rencana akan selalu dievaluasi sekali dalam triwulan. Apabila terdapat ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan direvisi sesuai dengan hasil Analisa kebutuhan.

Perubahan Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk pelaksanaan Renja Perubahan Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, penyusunan SOP dan penyusunan Kerangka Acuan kerja tahun berikutnya.

Lubuk Basung , Agustus 2025

KEPALA



Drs. SURYA WENDRI

NIP. 19660716 199303 1 006